

**ANALISIS KEBERDAYAAN MASYARAKAT PASCA DIMULAINYA
IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN ACEH BESAR**
*(Analysis Of Community Empowerment After the Start Of the Implementation Of Village Fund
Allocation (VFA) In Aceh Besar District)*

Muhammad Zulkarnaen¹, Edy Marsudi¹, Agussabti^{1*}

¹Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala

*Corresponding author: agussabti@unsyiah.ac.id

Abstrak. Strategi Pemerintah Indonesia menetapkan undang – undang Nomor. 6 tahun 2014 tentang desa sebagai prioritas pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa melalui program alokasi dana desa. Masyarakat merupakan objek yang berperan penting dalam implementasi alokasi dana desa, dan desa adalah subjeknya. Penelitian ini mengkaji tentang keberdayaan masyarakat pasca implemmentasi alokasi dana desa di Kabupaten Aceh Besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat keberdayaan masyarakat pasca dimulainya implementasi alokasi dana desa, dan menganalisis faktor –faktor yang berpengaruh terhadap keberdayaan masyarakat. Pengambilan data diperoleh dari wawancara (*survey*) terhadap 120 responden yang menetap pada kecamatan terjauh dari pusat Ibukota Provinsi yaitu Kecamatan Kota Jantho, dan pada kecamatan terdekat dari pusat ibukota Provinsi yaitu Kecamatan Darul Imarah di Kabupaten Aceh Besar. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan model Skala *Likert* dan uji statistik *Chi Square* melalui program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keberdayaan masyarakat pasca impelemntasi alokasi dana desa di Kabupaten Aceh Besar berada pada kategori kurang berdaya atau sedang, dan faktor – faktor ketersediaan sumber daya, kondisi sosial, kondisi ekonomi, teknologi tepat guna, dan bantuan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat keberdayaan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar. Dalam hal ini hanya berlaku untuk daerah penelitian, disebabkan karena kurangnya program yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan kurangnya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat menyebabkan keberdayaan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar belum berada pada kategori berdaya.

Kata Kunci: Keberdayaan masyarakat, implementasi, alokasi dana desa.

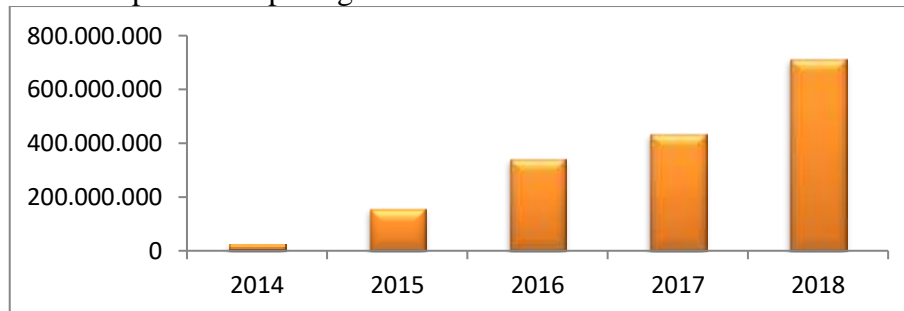
Abstract. The Indonesian Government's strategy stipulates contitution Number. 6 of 2014 about concerning villages as a priority for implementing village development and empowering rural communities through village fund allocation programs. The community is an object that plays an important role in the implementation of village fund allocation, and the village is the subject. This study examines community empowerment after the implementation of village fund allocation in Aceh Besar District. The purpose of this study was to find out how the level of community empowerment after the start of the implementation of village fund allocation, and analyze the factors that influence community empowerment. Data collection was obtained from interviews (surveys) of 120 respondents who settled in the farthest sub-district from the center of the Provincial Capital, namely Kota Jantho Subdistrict, and in the nearest sub-district from the center of the provincial capital, Darul Imarah District in Aceh Besar District. The analytical method in this study used the Likert Scale model and Chi Square statistical test through the SPSS program. The results of this study indicate that the level of community empowerment after the implementation of village fund allocation in Aceh Besar District is in the category of being weak or moderate, and the factors of availability of resources, social conditions, economic conditions, appropriate technology, and government assistance have no significant effect on level of community empowerment in Aceh Besar District. In this case only applies to the research area, because the lack of programs that can improve the economy of the community and the lack of an increase in service to the community has led to community empowerment in Aceh Besar District not yet in the empowered category.

Keywords: Community empowerment, implementation, village fund allocation.

PENDAHULUAN

Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) melalui ketetapan Undang – Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa berhubungan langsung dengan Pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan distribusi pendapatan yang merata (Todaro, 2006). Dilihat dari jumlah penduduk dan kompenan alam yang potensial masyarakat desa akan mendapatkan aset melalui program Alokasi Dana Desa

(ADD) dengan mempertimbangkan: 1) Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. 2) Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa. Berdasarkan hasil rekap data yang dilakukan oleh DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) dan Kemenkeu (Kementerian Keuangan, 2018). Untuk Provinsi Aceh jumlah Alokasi Dana Desa di Kabupaten Aceh Besar sejak di Implementasikan pada tahun 2014 terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2018. Jumlah Alokasi Dana Desa sejak tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kemenkue Prov. Aceh, 2018

Gambar 1. .Data Perkembangan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh Tahun 2014 – 2018.

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa Pergerakan jumlah Alokasi Dana Desa yang berasal dari Dana Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kabupaten atau Kota mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun awal percobaan Implementasi Alokasi Dana Desa di tahun 2014 Kabupaten Aceh Besar mendapatkan ADD sebesar Rp 24.920.622.000, disusul tahun 2015 sebesar Rp 156.476.096.000, tahun 2016 Rp 341.646.560.000, kemudian pada tahun 2017 sebesar Rp 413.146.968.000, disusul tahun 2018 mengalami peningkatan penerimaan Alokasi Dana Desa yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp 713.344.629.000. Alokasi Dana Desa tersebut nantinya akan dibagi untuk 23 Kecamatan dan diteruskan ke 604 Desa di Kabupaten Aceh Besar. Pembagian alokasi dana desa yang telah dibagikan sebelumnya diperhitungkan terlebih dulu berdasarkan jumlah penduduk (25%), angka kemiskinan (35%), luas wilayah (10%), dan Indeks kesulitan geografis (30%) dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersumber dari anggaran alokasi dana desa ditujukan agar terciptanya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang efektif di suatu desa dan akan berdampak kepada keberdayaan masyarakat dalam implementasi alokasi dana desa. Namun faktanya masih ada juga yang menggunakan alokasi dana desa tidak kepada prioritas yang diperlukan atau korupsi penggunaan dana desa. Hal ini dikarenakan efektifitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa masih rendah. Berdasarkan berita dari (Liputan 6, 19 Agustus 2017) Kementrerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengupayakan agar kasus dugaan korupsi dengan dana desa menjadi kasus terakhir, maka masih sangat perlu pengawasan yang ketat dan berlapis untuk dana desa yang diberikan ke setiap penggunaan dana desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberdayaan masyarakat pasca dimulainya implementasi alokasi dana desa, untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberdayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Besar. Penentuan lokasi penelitian

dilakukan dengan mempertimbangkan Jarak penelitian ke Pusat Ibukota Provinsi yaitu daerah dengan jarak terjauh dari pusat Ibukota Provinsi yaitu Kecamatan Jantho, dan daerah dengan jarak terdekat dari pusat Ibukota Provinsi yaitu Kecamatan Darul Imarah. Pengambilan berdasarkan jarak untuk melihat bagaimana pengaruh perbedaan tingkat keberdayaan masyarakat dan infrastruktur serta pembangunan desa dimasing – masing daerah. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Januari sampai April 2019. Objek penelitian ini yaitu 6 desa atas dasar pertimbangan jarak terjauh, menengah, dan terdekat dengan pusat pasar di Kecamatan masing-masing. Desa yang terpilih sebagai lokasi penelitian yaitu Desa Jantho Makmur, Jantho Baru dan Desa Suka Tani (Kecamatan Jantho), Desa Bayu, Desa Lampeunuerut Ujung Blang dan Desa Lee Ue (Kecamatan Darul Imarah). Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada tingkat keberdayaan masyarakat pasca dimulainya implementasi Alokasi Dana Desa, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberdayaan masyarakat pasca dimulainya implementasi Alokasi Dana Desa di Kabupaten Aceh Besar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode *Survey*. Pengambilan jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan sampling kuota. Kuota yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 120 jiwa, yaitu tokoh-tokoh penting yang dibutuhkan 42 jiwa aparatur pelaksana Alokasi Dana Desa dan 78 masyarakat di masing- masing Kecamatan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Skala Likert*, analisis statistik Uji *Chi – Square* dengan menggunakan software SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*), dan analisis deskriptif.

Tingkat Keberdayaan Masyarakat Pasca dimulainya implementasi Alokasi Dana Desa

Pengukuran indikator untuk mengetahui tingkat keberdayaan masyarakat pasca dimulainya implementasi Alokasi Dana Desa yaitu menggunakan skala likert, dengan metode deskriptif menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Menurut (Sukmadinata, 2005). untuk mengukur data yang sudah tersusun dalam bentuk instrumen pertanyaan digunakan skala likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, minat, motivasi, kegiatan dan pelaksanaan program. Keberdayaan akan didapatkan jika dalam pemanfaatan program Alokasi Dana Desa dapat melibatkan masyarakat secara aktif dan program terlaksana dengan baik. Indikator yang digunakan yaitu:

- a. Kesadaran dan keinginan berubah
- b. Kemampuan kapasitas untuk memperoleh akses
- c. Kemampuan menghadapi hambatan
- d. Kemampuan membangun kerjasama dan solidaritas.

Pengujian dengan skala Likert untuk skor yang diberikan yaitu mulai dari 1-3, dengan keterangan 1=Rendah, 2=Sedang, 3=Tinggi. Untuk mengetahui kriteria tingkat Keberdayaan masyarakat setelah implementasi Alokasi Dana Desa, maka menggunakan rumus sebagai berikut: (Putra, 2014)

$$RS = \frac{(m - n)}{b}$$

Dimana :

- RS : Rentang skala
m : Skor tertinggi dalam pengukuran
n : Skor terendah dalam pengukuran
b : Kategori yang dibentuk

$$RS = \frac{(48 - 16)}{3} = 11$$

Kriteria tingkat keberdayaan masyarakat setelah implementasi Alokasi Dana Desa berkisar antara 16 sampai 48. Adapun kriteria penafsirannya adalah sebagai berikut:

- a. 16 – 26 artinya: Tidak berdaya (rendah)
- b. 27 – 37 artinya: Kurang berdaya (sedang)
- c. 38 – 48 artinya: Berdaya (tinggi)

Tabel 1. Indikator dan Pengukuran Tingkat Keberdayaan Masyarakat Pasca dimulainya implementasi Alokasi Dana Desa

No.	Indikator	Pengukuran
1.	Tingkat kesadaran dan keinginan berubah	1. Kesadaran berubah pola pikir 2. Kesadaran perubahan kehidupan 3. Kesadaran perubahan program atau metode
2.	Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses	1. Kemampuan akses informasi 2. Kemampuan akses dana 3. Kemampuan akses program
3.	Tingkat kemampuan menghadapi hambatan	1. Kemampuan menghadapi hambatan program dana desa 2. Kemampuan menghadapi hambatan kegagalan program dana desa 3. Kemampuan menghadapi risiko bantuan dana desa
4.	Tingkat membangun kerjasama dan solidaritas	1. Kesiediaan bekerjasama aparat desa 2. Kesiediaan mengikuti program dana desa 3. Kemampuan menjalin hubungan antar sesama

Sumber: Data Primer (diolah), 2019

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Keberdayaan Masyarakat Pasca dimulainya implementasi Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan faktor-faktor yang memiliki pengaruh dengan Tingkat Keberdayaan Masyarakat pasca dimulainya implementasi Alokasi Dana Desa, yang menjadi variabel bebas yaitu Ketersediaan Sumber Daya (X_1), Kondisi Sosial (X_2) Kondisi Ekonomi (X_3), Teknologi tepat guna (X_4), Bantuan Pemerintah (X_5), yang menjadi variabel terikat yaitu tingkat keberdayaan masyarakat pasca dimulainya implementasi Alokasi Dana Desa (Y).

Untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat dilakukan pengujian hubungan variabel bebas dan variabel terikat dengan uji statistik chi square (χ^2). Uji *Chi Square* digunakan untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antar variabel ($C = \text{Coefisien of contingency}$). Untuk menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberdayaan masyarakat pasca dimulainya implementasi alokasi dana desa digunakan uji *Chi-Square* (Chi-kuadrat). Data-data yang telah dikumpulkan disusun dalam bentuk skor. Besarnya skor disesuaikan dengan banyaknya pilihan jawaban rumus sebagai berikut :

$$\chi^2 = \frac{[\sum (f_o - f_e)^2]}{f_e} \dots \dots \dots (\text{Sudjana, 2007})$$

Dimana : $A = \pi r^2$

χ^2 = nilai chi – kuadrat (*Chi-square* hitung)

f_o = frekuensi yang diobservasi

f_e = frekuensi yang diharapkan

Kriteria keputusan dengan taraf signifikan sebesar 0,05 yaitu :

Jika, χ^2 hitung $>$ χ tabel maka terima H_a tolak H_o

Jika, χ^2 hitung $<$ χ tabel maka terima H_o tolak H_a

Keterangan :

- Ha = ketersediaan sumber daya, kondisi sosial, kondisi ekonomi, teknologi tepat guna, bantuan pemerintah memiliki pengaruh terhadap keberdayaan masyarakat pasca dimulainya implementasi Alokasi Dana Desa di Kabupaten Aceh Besar.
- Ho = ketersediaan sumber daya, kondisi sosial, kondisi ekonomi, teknologi tepat guna, bantuan pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap keberdayaan masyarakat pasca dimulainya implementasi Alokasi Dana Desa di Kabupaten Aceh Besar.

Pada Uji Chi Square dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak aplikasi SPSS for windows ver. 16.0. dengan tingkat signifikan $p > 0,05$ (taraf kepercayaan 95%).

- a. Jika nilai sig $p > 0,05$ maka hipotesis penelitian ditolak.
- b. Jika nilai sig $p \leq 0,05$ maka hipotesis penelitian diterima.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tingkat Keberdayaan Masyarakat Pasca dimulainya implementasi Alokasi Dana Desa

Untuk mengukur tingkat keberdayaan masyarakat pasca dimulainya implementasi alokasi dana desa yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar digunakan 4 indikator yang menjadi derajat keberdayaan masyarakat. Untuk melihat tingkat keberdayaan masyarakat pasca dimulainya implementasi alokasi dana desa dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 2 Tingkat Keberdayaan Masyarakat di daerah penelitian

No.	Tingkat Keberdayaan	Aparatur Pelaksana		Masyarakat	
		Responden (Orang)	Persentase (%)	Responden (Orang)	Persentase (%)
1.	Tidak Berdaya (16 – 26)	-	-	4	5%
2.	Kurang Berdaya (27 – 37)	9	21%	50	64%
3.	Berdaya (38 – 48)	33	79%	24	31%
Jumlah		42	100%	78	100%

Sumber : Data Primer (diolah), 2019.

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa dari 79% aparatur pelaksana sudah menjawab dengan kategori berdaya, dan dari 64% masyarakat desa menjawab dengan kategori kurang berdaya. Dengan makna bahwa tingkat keberdayaan implementasi alokasi dana desa di Kabupaten Aceh Besar sudah mendekati yang terbaik namun masih kurang berdaya untuk masyarakat desa. Hal tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum merasakan secara nyata dan belum dilibatkan dalam implementasi alokasi dana desa, dikarenakan aparatur pelaksana yang masih belum tegas untuk melibatkan seluruh masyarakat dalam setiap program pelaksanaan alokasi dana desa, dan faktor program pemberdayaan masyarakat yang masih belum berjalan secara optimal, sehingga masyarakat belum mendapatkan manfaatnya secara keseluruhan dari pelaksanaan alokasi dana desa.

Faktor-faktor yang Memiliki Hubungan dengan Optimalisasi Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)

a. Ketersediaan Sumber Daya (X_1)

Ketersediaan Sumber Daya merupakan kriteria penting yang dimiliki masyarakat agar dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam implementasi alokasi dana desa, adapun pengaruh ketersediaan sumber daya terhadap keberdayaan masyarakat sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis Chi-Square Pada Ketersediaan Sumber Daya terhadap Keberdayaan Masyarakat

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	.438 ^a	2	.803
Likelihood Ratio	.448	2	.799
Linear-by-Linear Association	.288	1	.591
N of Valid Cases	78		

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,03.

Sumber: Data Primer (Diolah), 2019

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai X^2_{hitung} sebesar 0,438, sedangkan X^2_{tabel} pada taraf signifikan 0,05 dan derajat bebas df (2) adalah sebesar 5,99. Oleh karena itu $X^2_{hitung} < X^2_{tabel}$, dan dapat diketahui juga nilai *Asymp.Sig* yang diperoleh adalah 0,803. Yang lebih besar dari 0,05 bahwa artinya adalah tidak signifikan, maka keputusan yang dapat diambil adalah terima H_0 tolak H_a . Hasil analisis *Chi-Square* terhadap variabel ketersediaan sumber daya terhadap keberdayaan masyarakat tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat keberdayaan masyarakat dalam implementasi alokasi dana desa, dapat diketahui bahwa ketersediaan sumber daya yang ada seperti ketersediaan sumber daya tenaga kerja tidak seluruhnya ikut dilibatkan dalam implementasi alokasi dana desa, dan ketersediaan sumber daya potensi desa masih belum dapat dikembangkan sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat setempat yang mengakibatkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara ketersediaan sumber daya terhadap tingkat keberdayaan masyarakat.

b. Kondisi Sosial (X_2)

Kondisi sosial adalah suatu aspek yang mempengaruhi individu dan meliputi dari beberapa indikator yaitu tingkat keterlibatan dan partisipasi, serta hubungan interaksi sosial dalam implementasi alokasi dana desa, adapun pengaruh kondisi sosial terhadap keberdayaan masyarakat pasca dimulainya implementasi alokasi dana desa sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Analisis Chi-Square Pada Kondisi Sosial terhadap Keberdayaan Masyarakat

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	.059 ^a	2	.971
Likelihood Ratio	.057	2	.972
Linear-by-Linear Association	.003	1	.958
N of Valid Cases	78		

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,82.

Sumber: Data Primer (Diolah), 2019

Berdasarkan tabel 31 dapat dilihat bahwa nilai X^2_{hitung} sebesar 0,059, sedangkan X^2_{tabel} pada taraf signifikan 0,05 dan derajat bebas df (2) adalah sebesar 5,99. Oleh karena itu $X^2_{hitung} < X^2_{tabel}$, dan dapat diketahui juga nilai *Asymp.Sig* yang diperoleh adalah 0,971. Yang lebih besar dari 0,05 bahwa artinya adalah tidak signifikan, maka keputusan yang dapat diambil adalah terima H_0 tolak H_a . Hasil analisis *Chi-Square* terhadap variabel kondisi sosial terhadap keberdayaan masyarakat tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat keberdayaan masyarakat dalam implementasi alokasi dana desa.

c. Kondisi Ekonomi (X_3)

Kondisi Ekonomi merupakan aspek kelas ekonomi dalam kategori taraf kondisi hidup yang berdampak pada jumlah pendapatan dan aset rumah tangga sebagai faktor pendukung keberdayaan masyarakat, adapun pengaruh kondisi ekonomi terhadap keberdayaan masyarakat pasca dimulainya implementasi alokasi dana desa sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Analisis Chi-Square Pada Kondisi Ekonomi terhadap Keberdayaan Masyarakat

Chi-Square Tests			
	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	3.363 ^a	4	.499
Likelihood Ratio	3.430	4	.489
Linear-by-Linear Association	.103	1	.748
N of Valid Cases	78		

a. 5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,26.

Sumber: Data Primer (Diolah), 2019

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai X^2_{hitung} sebesar 3,363, sedangkan X^2_{tabel} pada taraf signifikan 0,05 dan derajat bebas df (4) adalah sebesar 9,48. Oleh karena itu $X^2_{hitung} < X^2_{tabel}$, dan dapat diketahui juga nilai *Asymp.Sig* yang diperoleh adalah 0,499. Yang lebih besar dari 0,05 bahwa artinya adalah tidak signifikan, maka keputusan yang dapat diambil adalah terima H_0 tolak H_a . Hasil analisis *Chi-Square* terhadap variabel kondisi ekonomi terhadap keberdayaan masyarakat tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat keberdayaan masyarakat dalam implementasi alokasi dana desa. Hal ini dikarenakan alokasi dana desa di Kabupaten Aceh Besar tidak untuk menyediakan modal kerja bagi masyarakat, tidak seperti penelitian Boonperm, J. *et.al.* (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “*Does the village fund matter in thailand? evaluating the impact on incomes and spending*” menunjukkan bahwa alokasi dana desa sebagai wadah yang memberikan modal kerja bagi asosiasi kredit bergilir yang dikelola secara lokal seperti masyarakat yang memiliki usaha diberikan modal pinjaman, dan usaha Pertanian dan Koperasi Pertanian diberikan modal pupuk dan lain sebagainya, jika ini diterapkan di daerah penelitian maka akan berdampak pada kondisi ekonomi yang memiliki efek lebih kuat pada pendapatan daripada pada pengeluaran sehingga meningkatkan keberdayaan masyarakat setempat.

d. Teknologi Tepat Guna (X_4)

Teknologi tepat guna merupakan suatu sarana prasarana yang mendukung desa atau wilayah untuk memenuhi kebutuhannya, adapun pengaruh teknologi tepat guna terhadap keberdayaan masyarakat pasca dimulainya implementasi alokasi dana desa sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Analisis Chi-Square Pada Teknologi Tepat Guna terhadap Keberdayaan Masyarakat

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	5.205 ^a	4	.267
Likelihood Ratio	6.912	4	.141
Linear-by-Linear Association	1.077	1	.299
N of Valid Cases	78		

a. 4 cells (44,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,51.

Sumber: Data Primer (Diolah), 2019

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai X^2_{hitung} sebesar 5,205, sedangkan X^2_{tabel} pada taraf signifikan 0,05 dan derajat bebas df (4) adalah sebesar 9,48. Oleh karena itu $X^2_{hitung} < X^2_{tabel}$, dan dapat diketahui juga nilai *Asymp.Sig* yang diperoleh adalah 0,267. Yang lebih besar dari 0,05 bahwa artinya adalah tidak signifikan, maka keputusan yang dapat diambil adalah terima H_0 tolak H_a . Hasil analisis *Chi-Square* terhadap variabel teknologi tepat guna terhadap keberdayaan masyarakat tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat keberdayaan masyarakat dalam implementasi alokasi dana desa. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana yang ada masih belum memadai, contohnya untuk sarana kesehatan ada tetapi tidak dijalankan secara optimal, untuk sarana pertanian masih belum memadai sebagai kelengkapan tolak ukur teknologi yang tepat guna.

e. Bantuan Pemerintah (X_5)

Bantuan pemerintah merupakan aspek fungsional berupa dana bantuan yang diberikan pemerintah serta aspek teknis bantuan pemerintah seperti sosialisasi atau pelatihan program dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat, adapun pengaruh teknologi tepat guna terhadap keberdayaan masyarakat pasca dimulainya implementasi alokasi dana desa sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Analisis Chi-Square Pada Bantuan Pemerintah terhadap Keberdayaan Masyarakat

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	3.289 ^a	4	.511
Likelihood Ratio	3.442	4	.487
Linear-by-Linear Association	.534	1	.465
N of Valid Cases	78		

a. 5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,31.

Sumber: Data Primer (Diolah), 2019

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai X^2_{hitung} sebesar 3,289, sedangkan X^2_{tabel} pada taraf signifikan 0,05 dan derajat bebas df (4) adalah sebesar 9,48. Oleh karena itu $X^2_{hitung} < X^2_{tabel}$, dan dapat diketahui juga nilai *Asymp.Sig* yang diperoleh adalah 0,511. Yang lebih besar dari 0,05 bahwa artinya adalah tidak signifikan, maka keputusan yang dapat diambil adalah terima H_0 tolak H_a . Hasil analisis *Chi-Square* terhadap variabel bantuan pemerintah terhadap keberdayaan masyarakat tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat

keberdayaan masyarakat dalam implementasi alokasi dana desa. Hal ini dikarenakan bantuan yang pemerintah berikan tidak berjalan secara optimal untuk program pemberdayaan masyarakat, contohnya banyak masyarakat yang memiliki usaha keripik seperti di Desa Jantho Baru Kecamatan Kota Jantho itu tidak diberikan modal bantuan sama sekali, sehingga mereka berasumsi bahwa dana desa tidak dapat membantu meningkatkan ekonomi mereka.

Salah satu masyarakat (CH) mengatakan “*program pembangunan desa yang hanya berjalan secara optimal, kalau seperti bantuan modal usaha tidak ada sama sekali, padahal itu yang kami butuhkan*”. (Hasil wawancara 12 April 2019). Hal tersebut perlu diperhatikan secara lebih intensif, agar masyarakat yang memiliki usaha untuk kemajuan suatu desa dapat dikembangkan melalui program intensif pemberdayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Adapun tingkat Keberdayaan Masyarakat Pasca dimulainya Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Aceh Besar masih berada pada kategori kurang berdaya (sedang) dengan persentase sebesar 64%. Ini terjadi karena masyarakat melihat kurangnya program yang dilakukan oleh pemerintah setempat guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilihat berdasarkan jawaban responden yang diukur dari beberapa indikator yaitu tingkat kesadaran dan keinginan berubah, tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas dalam memperoleh akses, tingkat kemampuan menghadapi hambatan, dan tingkat kemampuan membangun kerjasama dan solidaritas.

Faktor- Faktor variabel bebas seperti Ketersediaan Sumber Daya (X_1), Kondisi Sosial (X_2), Kondisi Ekonomi (X_3), Teknologi Tepat Guna (X_4), dan Bantuan Pemerintah (X_5) tidak berpengaruh terhadap tingkat keberdayaan masyarakat pasca dimulainya implementasi alokasi dana desa di Kabupaten Aceh Besar. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum terlibat dalam setiap program alokasi dana desa serta masih kurang optimalnya program pemberdayaan yang dilaksanakan guna meningkatkan keberdayaan masyarakat sehingga variabel bebas yang digunakan dalam melihat tingkat keberdayaan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar tidak tepat sasaran ke kebutuhan masyarakat setempat, dan hal ini berlaku khusus pada tingkat keberdayaan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar pada Kecamatan Kota Jantho dan Kecamatan Darul Imarah dan tidak berlaku secara umum (*general*), disarankan pula untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian guna melihat tingkat keberdayaan masyarakat melalui program Badan Usaha Milik Desa (BUMN) agar terlihat lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Boonperm, J. Houghton, J. Khandar, S.R. 2013. Does the village fund matter in thailand? evaluating the impact on incomes and spending. *Journal Of Asean Economics*. Vol. 25: 3-16.
- Joseph,P. Kobisko. Towsend M.R. 2012. The Impact of Credit on Village Economies. *American Economic Journal: Applied Economics*. Vol. 4. No 2.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2018. www.djpk.depkeu.go.id/wpcontent/uploads/.../Rincian-Alokasi-TKDD-TA-2018-1.pdf: (diakses tanggal 05 Januari 2019).
- Liputan 6. Berita: Kemendes: Pengawasan Dana Desa Akan Diperkuat. <http://news.liputan6.com/read/3063796/kemendes-pengawasan-dana-desa-akan-diperkuat>. diakses tanggal: 26 November 2018.
- Long, H. Tu,S. Ge,D. Li, T. Liu, Y. 2016. The Allocation and Management of critical in rural China under restructuring: Problems and prospects. *Journal of Rural State xxx*. Vol. 30: 1 -25.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Pasal 96 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2018.
- Putra, Z.F.S. 2014. Analisis Kualitas Layanan Website BTKP-DIY Menggunakan Metode Webqual 4.0. *Jurnal Jarkom*. 1(2): 174-184.
- Sukmadinata, N.S. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sudjana. 2007. *Metode Statistika*. Tarsito, Bandung.
- Suriadi, A. Rudjiman. Mahalli, K. Achmad, N. Muda, I. 2015. THE APPLICATIVE MODEL OF THE VILLAGE OWNED ENTERPRISES (BUMDES) DEVELOPMENT IN NORTH SUMATERA. *Global Journal of Arts, Humanities and Social Sciences*. Vol. 3. No. 12.
- Temenggung, Y.A. 2016. Rural Financial Management In Perspective Law No. 6 Of 2014 Concerning The Village. *International Journal Of Social Sciences*. Vol 43. No.1.
- Todaro, Michael P. 2006. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Alih Bahasa: Amminudin dan Drs. Mursid: Ghalia Indonesia. Jakarta.